

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan sebuah permasalahan sosial yang sangat kompleks dan harus segera mendapat penanganan yang tepat agar dapat segera teratasi. Indonesia sebagai negara berkembang dan memiliki jumlah penduduk yang besar tentu tidak dapat terhindar dari masalah tersebut. Hal ini dibuktikan dengan jumlah penduduk miskin yang besar, mayoritas tinggal di daerah pedesaan yang sulit untuk di akses bahkan di kota besar seperti Jakarta pun juga sangat banyak ditemukan masyarakat miskin. Kemiskinan dapat diartikan dimana seseorang sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dikarenakan berbagai penyebab salah satunya adalah tingkat pengangguran disuatu daerah.

Istilah kemiskinan muncul pada saat seseorang atau sekelompok orang tidak dapat atau tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari selama hidupnya. Kemiskinan juga dapat dikatakan sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup.

Berbagai kegiatan pembangunan nasional dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Salah satunya dengan mengarahkan berbagai kegiatan pembangunan ke daerah-daerah, khususnya pembangunan pada daerah yang relatif memiliki penduduk dengan tingkat kesejahteraan yang rendah. Pembangunan sendiri dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan akar dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program pembangunan jangka pendek dan jangka panjang nasional (Musa, 2014). Indikator utama

keberhasilan pembangunan nasional salah satunya adalah menurunnya jumlah penduduk miskin di provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Tabel 1.1
Kemiskinan Menurut Provinsi yang ada di Indonesia
Tahun 2014 – 2015

No	Provinsi	2014		2015	
		Maret	September	Maret	September
1	ACEH	881.25	837.42	851.59	859.41
2	SUMATERA UTARA	1286.67	1360.6	1463.67	1508.14
3	SUMATERA BARAT	379.2	354.74	379.61	349.53
4	RIAU	499.88	498.28	531.39	562.92
5	JAMBI	263.8	281.75	300.71	311.56
6	SUMATERA SELATAN	1100.83	1085.8	1145.63	1112.53
7	BENGKULU	320.95	316.5	334.07	322.83
8	LAMPUNG	1142.91	143.94	1163.49	1100.68
9	KEP. BANGKA BELITUNG	71.64	67.23	74.09	66.62
10	KEP. RIAU	127.8	124.17	122.4	114.83
11	DKI JAKARTA	393.98	412.79	398.92	368.67
12	JAWA BARAT	4327.07	4238.96	4435.7	4485.65
13	JAWA TENGAH	4836.46	4561.82	4577.04	4505.78
14	DI YOGYAKARTA	544.87	532.58	550.23	485.56
15	JAWA TIMUR	4786.79	4748.42	4789.12	4775.97
16	BANTEN	622.83	649.19	702.4	690.67
17	BALI	185.2	195.96	196.71	218.79
18	NUSA TENGGARA BARAT	820.82	816.62	823.89	802.29
19	NUSA TENGGARA TIMUR	994.67	991.88	1159.84	1160.53
20	KALIMANTAN BARAT	401.51	381.91	383.7	405.51
21	KALIMANTAN TENGAH	146.33	148.82	147.7	148.13

22	KALIMANTAN SELATAN	182.88	189.49	198.44	189.16
23	KALIMANTAN TIMUR	253.6	252.68	212.89	209.99
24	KALIMANTAN UTARA	-	-	39.69	40.93
25	SULAWESI UTARA	208.23	197.56	208.54	217.15
26	SULAWESI TENGAH	392.65	387.06	421.62	406.34
27	SULAWESI SELATAN	864.3	806.35	797.72	864.51
28	SULAWESI TENGGARA	342.26	314.09	321.88	345.02
29	GORONTALO	194.17	195.1	206.84	206.51
30	SULAWESI BARAT	153.89	154.69	160.48	153.21
31	MALUKU	316.11	307.02	328.41	327.78
32	MALUKU UTARA	82.64	84.79	79.9	72.65
33	PAPUA BARAT	229.43	225.46	225.36	225.54
34	PAPUA	924.41	864.11	859.15	898.21

Sumber : Badan Pusat Statistik DKI Jakarta

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa Daerah Khusus Ibukota Jakarta menduduki posisi sebelas untuk jumlah penduduk miskin pada bulan September 2015 sebesar 368,67 ribu orang (3,6 persen). Dibandingkan dengan Maret 2015 (398,92 ribu orang atau 3,93 persen), jumlah penduduk miskin turun sebesar 30,25 ribu atau turun 0,32 poin. Sedangkan dibandingkan dengan September 2014 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 412,79 ribu orang (4,09 persen), jumlah penduduk miskin turun 44,12 ribu atau turun 0,48 poin.

Tingginya tingkat kemiskinan di DKI Jakarta membuat pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Untuk menurunkan tingkat kemiskinan terlebih dahulu perlu diketahui faktor-faktor

apa yang mempengaruhi tingkat kemiskinan, sehingga dapat dirumuskan kebijakan yang efektif untuk menurunkan angka kemiskinan di DKI Jakarta. Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi tingkat kemiskinan di DKI Jakarta antara lain (1) Produk Domestik Regional Bruto; (2) Tingkat Pengangguran Terbuka; (3) Indeks Pembangunan Manusia; (4) Tingkat Penduduk; (5) Jumlah Penduduk.

Pembangunan ekonomi itu bersifat multidimensi yang mencakup berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat, bukan hanya salah satu aspek (ekonomi) saja. Pembangunan ekonomi juga perlu dipandang sebagai suatu proses kenaikan dalam pendapatan per kapita, karena kenaikan tersebut mencerminkan tambahan pendapatan dan adanya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat (Lincoln, 2010).

Kemiskinan menjadi salah satu penyakit dalam perekonomian di hampir setiap negara, terlebih lagi dinegara berkembang seperti Indonesia yang masih memiliki tingkat kemiskinan cukup tinggi dibandingkan beberapa negara sekitarnya. Sama halnya dengan Jakarta yang menjadi pusat ekonomi dan Ibukota dari Indonesia, banyaknya pendatang yang mencari pekerjaan di Ibukota dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak tetapi pada kenyataannya hanya sebagian kecil yang mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan. Pada tabel 1.2 ini akan dijelaskan persentase penduduk miskin yang ada di Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 1.2
Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota DKI Jakarta
Tahun 2009 – 2014

Kabupaten/Kota Adm.	Persentase Penduduk Miskin (%)					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kepulauan Seribu	12,66	13,07	11,53	11,62	11,01	13,8
Jakarta Selatan	3,52	3,80	3,43	3,49	3,47	3,80
Jakarta Timur	3,42	3,40	3,06	3,12	3,10	3,40
Jakarta Pusat	3,68	3,97	3,56	3,72	3,70	3,97
Jakarta Barat	3,44	3,82	3,44	3,47	3,46	3,82
Jakarta Utara	5,34	5,62	5,07	5,14	5,30	5,62

Sumber : Badan Pusat Statistik DKI Jakarta

Kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten/kota kepulauan seribu dengan persentase kemiskinan 12,66 persen di tahun 2009, sedangkan di Jakarta Selatan pada tahun 2010 persentase kemiskinan sebesar 3,80 persen lalu di tahun 2011 sempat turun menjadi 3,43 persen dan di tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 3,80 persen. Tahun 2010 dan 2014 Jakarta Timur mengalami peningkatan yang sama sebesar 3,40 persen. Jakarta Pusat peningkatan kemiskinan tahun 2010 dan 2014 sama sebesar 3,97 persen, Jakarta Barat peningkatan kemiskinan terjadi pada tahun 2010 dan 2014

sebesar 3,82 persen dan Jakarta Utara sebesar 5,62 persen untuk tahun 2010 dan 2014.

Struktur perekonomian Provinsi Jakarta menurut lapangan usaha selama semester 1-2015 didominasi oleh empat lapangan usaha utama yaitu : perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor (16,75 persen), industri pengolahan (13,93 persen), konstruksi (13,22 persen) dan jasa keuangan (10,11 persen).

Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Terdapat pendapat bahwa pertumbuhan yang cepat berakibat buruk terhadap kaum miskin, karena mereka akan tergilas dan terpinggirkan oleh perubahan struktural pertumbuhan ekonomi. Pendapat lain mengatakan bahwa konsentrasi penuh untuk pengentasan kemiskinan akan memperlambat tingkat pertumbuhan ekonomi, karena dana pemerintah akan habis untuk penanggulangan kemiskinan sehingga proses pertumbuhan ekonomi akan melambat (Todaro, 2000).

Banyak faktor lain selain pertumbuhan pendapatan yang juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan disuatu wilayah/negara, seperti tingkat pengangguran, dimana tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat menyebabkan masalah pengangguran di negara sedang berkembang menjadi semakin serius dan jumlah penduduk di perkotaan dimana setiap tahunnya mengalami peningkatan sehingga menimbulkan persaingan dikalangan masyarakat, baik

dalam dunia kerja. Tingkat pengangguran diperkotaan terlebih di Provinsi DKI Jakarta yang menjadi pusat ekonomi sekaligus Ibukota Indonesia hanya menunjukkan aspek-aspek yang tampak saja dari masalah kesempatan kerja, yang sebenarnya sebagian besar dari mereka, yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau hanya bekerja paruh waktu (*part-time*) selalu berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin.

Namun demikian, sangat keliru jika kita beranggapan bahwa setiap orang yang tidak mempunyai pekerjaan adalah orang miskin, sedangkan yang bekerja secara penuh adalah orang kaya. Sebab tingginya tingkat pengangguran diakibatkan karena kebanyakan masyarakat ingin bekerja sesuai dengan pendidikannya dan kurangnya lapangan pekerjaan serta daya saing yang sangat tinggi.

Pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi akan menyebabkan cepatnya laju pertambahan jumlah angkatan kerja, sedangkan kemampuan Negara sedang berkembang terutama DKI Jakarta dalam meningkatkan kesempatan kerja baru sangatlah terbatas. Berdasarkan latar belakang diatas untuk lebih lanjut penelitian ini akan membahas “Analisis pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2008 – 2014”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan pada Provinsi di DKI Jakarta ?

2. Bagaimana pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan pada Provinsi di DKI Jakarta ?
3. Bagaimana pengaruh Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan pada Provinsi di DKI Jakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk terhadap tingkat kemiskinan pada Provinsi di DKI Jakarta
2. Menganalisis pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan pada Provinsi di DKI Jakarta
3. Menganalisis pengaruh Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan pada Provinsi di DKI Jakarta

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Ilmiah
 - a. Bagi penulis secara khusus, penelitian ini merupakan sebuah kesempatan untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh dari bangku kuliah pada proram S1 jurusan Ilmu Ekonomi.
 - b. Bagi Akademisi, penelitian ini akan menambah wawasan kepada para akademisi tentang faktor pengaruh serta perbedaan tingkat kemiskinan di berbagai kabupaten di provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, serta sebagai bahan refensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan kemiskinan di Provinsi.

2. Manfaat Praktik

- a. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan ekonomi, khususnya ekonomi pembangunan. Manfaat khusus bagi ilmu pengetahuan yaitu dapat melengkapi kajian mengenai tingkat kemiskinan dengan mengungkap secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- b. Pengambil kebijakan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna di dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang perlu dipacu untuk mengatasi masalah kemiskinan yang ada.